

**FENOMENA GOLPUT DALAM PEMILIHAN BUPATI TUBAN  
TAHUN 2006 DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM**



Oleh  
**Nunuk Handayani. S. H. I.**  
NIM. 08 234 466

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA**

**2011**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nunuk Handayani, S. H. I.  
NIM : 08 234 466  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam (SPPI)

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 30 Agustus 2011

Saya yang menyatakan,



Nunuk Handayani, S. H. I.  
NIM : 08.234.466



**PROGRAM PASCASARJANA**  
**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

### **PENGESAHAN**

Tesis berjudul : **FENOMENA GOLPUT DALAM PEMILIHAN BUPATI**  
**TUBAN TAHUN 2006 DALAM PERSPEKTIF**  
**POLITIK ISLAM**  
Nama : **Nunuk Handayani, S. H. I.**  
NIM : **08 234 465**  
Prodi : **Hukum Islam**  
Kosentrasi : **Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam (SPPI)**  
Tanggal Ujian :

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta, 30 Agustus 2011

Direktur,







**Prof. Dr. H. Khoruddin Nasution**  
**NIP. 150178204**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : FENOMENA GOLPUT DALAM PEMILIHAN BUPATI  
TUBAN TAHUN 2006 DALAM PERSPEKTIF  
POLITIK ISLAM  
Nama : Nunuk Handayani, S. H. I.  
NIM : 08 234 466  
Prodi : Hukum Islam  
Kosentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam (SPPI)

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| Ketua              | : Prof. Dr. H. Abd Salam Arief, M.A    | (  )  |
| Sekretaris         | : Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M.Si   | (  )  |
| Pembimbing/Penguji | : Prof. Dr. HM. Abdul Karim, M.A., M.A | (  )  |
| Penguji            | : Dr. Ahmad Yani Anshori. M.A          | (  ) |

diuji di Yogyakarta pada tanggal

Waktu :  
Hasil/Nilai :  
Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Cumlaude

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, penilaian, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Naskah Tesis berjudul :

### **FENOMENA GOLPUT DALAM PEMILIHAN BUPATI TUBAN TAHUN 2006 DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM**

yang ditulis oleh,

|               |   |
|---------------|---|
| Nama          | : Nunuk Handayani, S. H. I.                         |
| NIM           | : 08 234 466  |
| Jenjang       | : Magister (S2)                                     |
| Program Studi | : Hukum Islam                                       |
| Konsentrasi   | : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam (SPPI) |

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Agustus 2011  
Pembimbing,



**Prof. Dr. H. M. Abdul Karim, M. A. M. A.**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas Fenomena Golput dalam Pemilihan Bupati Tuban, yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 April 2006. Golput merupakan fenomena yang senantiasa terjadi dalam setiap pemilihan umum baik pemilihan presiden, legeslatif, gubernur sampai pemilihan bupati. Golput pada awalnya merupakan gerakan moral yang diproklamirkan pertama kali di gedung budaya Jakarta sebagai bentuk protes terhadap pemilihan umum yang diselenggarakan oleh negara pada waktu itu

Golput selalu eksis dalam setiap pemilihan umum, hal ini dikarenakan sistem demokrasi karena dalam sistem ini rakyat diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan khususnya dalam hal memilih kepala negara atau kepala pemerintahan. Memilih merupakan hak setiap warga negara yang telah dinyatakan dewasa oleh undang-undang untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih presiden, legeslatif, gubernur dan bupati.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan diskriptif-analisis yang menggunakan pendekatan perilaku. Dengan tujuan untuk memperoleh data secara langsung dari partisipasi dan informasi dari objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan dokumentasi.

Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian ini adalah kota Tuban, dengan alasan pemilihan bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan pada tahun 2006 adalah pemilihan pertama yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk ikut serta dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, di mana pemilihan bupati sebelumnya merupakan wewenang anggota dewan dengan sistem voting tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Setelah dilaksanakannya pemilihan bupati ternyata angka golput cukup tinggi, hal ini berkaitan dengan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban

Hasil penelitian ini adalah, banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya golput yang berkaitan dengan kondisi sosio-ekonomi, pendidikan dan juga peran KPUD (Komisi Pemilihan Umum daerah) sebagai penyelenggara pilkada (pemilihan bupati) terkait masalah DPT (daftar pemilih tetap), sikap apatis masyarakat terhadap pilbub ini mengakibatkan angka golput dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal ini bupati dan wakil bupati tuban sangat tinggi.

Jika kekecewaan pemilih terus berlarut-larut dan makin bertambah pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah maka akan terjadi apatisisme mayoritas yang akan membawa golput sebagai pemenang, hal ini akan melemahkan legitimasi kepemimpinan terpilih dan membahayakan kelangsungan pemerintahan yang sukses dan mensejahterakan karna kebijakan-kebijakan yg dikeluarkan tidak ditaati dan kurang mendapat respon positif dari masyarakat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | N a m a                     |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | ba'  | b                  | Be                          |
| ت          | ta'  | t                  | Te                          |
| ث          | sa'  | s                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | jim  | j                  | Je                          |
| ح          | ha'  | h                  | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha' | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | dal  | d                  | De                          |
| ذ          | zal  | z                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | r                  | Er                          |
| ز          | zai  | z                  | Zet                         |
| س          | sin  | s                  | Es                          |
| ش          | syin | sy                 | Es dan Ye                   |
| ص          | sad  | s                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | dad  | d                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ta'  | t                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | za'  | z                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain | '                  | koma terbalik di atas       |
| غ          | gain | g                  | Ge                          |
| ف          | fa'  | f                  | Ef                          |
| ق          | qaf  | q                  | Qi                          |
| ك          | kaf  | k                  | Ka                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ل  | lam    | l | El       |
| م  | mim    | m | Em       |
| ن  | nun    | n | En       |
| و  | waw    | w | We       |
| هـ | ha'    | h | Ha       |
| ء  | hamzah | ` | apostrof |
| ي  | ya     | y | Ye       |

## B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

|               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| متعددة<br>عدة | ditulis | <i>muta`addidah</i> |
|               | ditulis | <i>`iddah</i>       |

## C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

|             |         |               |
|-------------|---------|---------------|
| حكمة<br>علة | ditulis | <i>Hikmah</i> |
|             | ditulis | <i>`illah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

|                |         |                          |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karāmah al-aulyā`</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>zakātul fit{ri</i> |
|------------|---------|-----------------------|



#### D. Vokal Pendek

|      |        |         |         |
|------|--------|---------|---------|
| فعل  | fathah | ditulis | a       |
| —    |        | ditulis | fa'ala  |
| —    |        | ditulis | i       |
| ذكر  | kasrah | ditulis | zukira  |
| —    |        | ditulis | u       |
| يذهب | dammah | ditulis | yazhabu |

#### E. Vokal Panjang

|   |                           |         |                   |
|---|---------------------------|---------|-------------------|
| 1 | fathah + alif<br>جاهلية   | ditulis | <i>ā</i>          |
|   |                           | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| 2 | fathah + yā' mati<br>تنسى | ditulis | <i>ā</i>          |
|   |                           | ditulis | <i>tansā</i>      |
| 3 | kasrah + yā' mati<br>كريم | ditulis | <i>ī</i>          |
|   |                           | ditulis | <i>karīm</i>      |
| 4 | dammah + waû mati<br>فروض | ditulis | <i>ū</i>          |
|   |                           | ditulis | <i>furūd</i>      |

#### F. Vokal Rangkap

|   |                            |         |                 |
|---|----------------------------|---------|-----------------|
| 1 | fathah + yā' mati<br>بينكم | ditulis | <i>ai</i>       |
|   |                            | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2 | fathah + wawu mati<br>قول  | ditulis | <i>aū</i>       |
|   |                            | ditulis | <i>qaūlun</i>   |

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

|                 |         |                        |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ        | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعَدْتُمْ      | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*l*”.

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ | ditulis | <i>al-Qur`ān</i> |
| الْقِيَاسُ | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | ditulis | <i>as-Samā`</i>  |
| الشَّمْسُ  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ  | ditulis | <i>Z awi al-furūd{</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | ditulis | <i>ahl as-sunnah</i>   |

## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan penulis agendakan, maka dari itu tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kecuali senantiasa memuji dan bersyukur kepada-Nya dalam setiap kesempatan. Shalawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, alam yang penuh dengan peradaban dan pencerahan.

Dalam penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Musya Asya'ari, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M. A. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Prof. Dr. H. Abd Salam Arief, M. A. selaku Ketua Program Studi Hukum Islam yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam memulai dan menyelesaikan Tesis ini.
4. Prof. Dr. H. M. Abdul Karim, M. A, M. A. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kecermatan untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh dosen Program Pascasarjana yang telah memberikan ilmunya kepada penulis yang sangat bermanfaat bagi penulisan tesis ini :

- ✓ Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, Ph. D. (Sejarah Pemikiran Hukum Islam)
  - ✓ Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, SH (Alm), (Teori Konstitusi)
  - ✓ Prof. Dr. H. Musya Asya'ari (Islam dan Negara Bangsa)
  - ✓ Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M. A, Ph. D (Politik Islam Kawasan)
  - ✓ Prof. Dr. H. M. Abdul Karim, M. A. M. A. (Sejarah Peradaban Islam)
  - ✓ Dr. Munawar Ahmad, M. A. (Islam dan Negara Bangsa)
  - ✓ Dr. Hamim Ilyas, M. A. (Studi Qur'an-Hadis)
  - ✓ Dr. Yani Anshori (Islam dan Negara Bangsa)
  - ✓ Dr. Suharko/Nur Ichwan (Sosiologi Politik)
  - ✓ Dr. Siti Mutiah/Faturrahman (Ilmu Politik)
  - ✓ Dr. Siti Daulah (Metodologi Penelitian Ilmu Politik dan Pemerintahan)
  - ✓ Drs. Muchamad Shodik, M. Si. (Penulisan Proposal)
  - ✓ Wawan Masudi, SIP, MLL (Ilmu Pemerintahan)
  - ✓ Nanang Nur Ichwan. SIP., MLL (Etika Politik dan Pemerintahan)
6. Ayahanda dan Ibunda penulis, yang sudah begitu sabar menunggu kelulusanku dengan doa yang tidak pernah putus untuk keberhasilanku, ayahanda yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita penulis dan menjadi teman diskusi yang menyenangkan
  7. Kakak dan semua sepupu penulis yang senantiasa memberi cinta, kasih sayang, dan support sehingga aku benar-benar merasakan memiliki keluarga yang sempurna
  8. Teman-teman angkatan tahun 2008, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Mas Sandro (Blitar/085643040016), Mas Fadli

(Padang/081328536392), Mas Robit (Jember/081328458430), Mas Rizal (Pacitan/085228129306), Mas Agus (Kediri), Mas Hartono (Kaltim/081908442585), Mbak Nikmah (Jambi/), Mbak Ama (Rembang/085643139122), dan Mbak Marni (TU HI) yang telah menjalin *ukhuwah* yang sangat bermakna, saling membantu dan member motivasi.

9. Teman-teman *Freedom* yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan segala hormat dan ucapan yang luar biasa penulis haturkan terima kasih atas segala bimbingan dan do'a yang penulis selama ini dapatkan.

Yogyakarta,

Penulis,

Nunuk Handayani, S. H. I.  
NIM. 08 234 466

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>  | <b>ii</b>    |
| <b>PENGESAHAN DIREKTUR .....</b>  | <b>iii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>  | <b>iv</b>    |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>  | <b>v</b>     |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>vi</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>  | <b>vii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>xi</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>xv</b>    |
| <br><b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>  | <br><b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....  | 6            |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                                     | 6            |
| D. Kajian Pustaka .....   | 7            |
| E. Kerangka Teoritik .....  | 10           |
| F. Metode Penelitian .....  | 12           |
| G. Sistematika Pembahasan .....   | 14           |
| <br><b>BAB II : POLITIK ISLAM: PARTISIPASI POLITIK DAN</b>                  |              |
| <b>PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM POLITIK ISLAM...</b>                       | <b>17</b>    |
| A. Politik Islam .....  | 17           |
| B. Partisipasi Politik .....  | 20           |
| 1. Tipologi Partisipasi Politik .....                                       | 18           |
| 2. Model dan bentuk Partisipasi Politik .....                               | 20           |
| 3. Prilaku Pemilih .....  | 22           |
| C. Penyelenggaraan Pemerintah .....   | 26           |
| 1. Pengangkatan Kepala Negara .....   | 28           |
| 2. Syarat-Syarat Kepala Negara .....  | 29           |
| 3. Tugas dan Wewenang Kepala Negara .....                                   | 32           |
| D. Proses Suksesi Kepala Negara dalam Politik Islam dari Masa ke Masa ..... | 33           |
| 1. Masa Klasik .....  | 33           |
| 2. Corak pemerintahan Pasca Khulafa al Rasyidun .....                       | 47           |
| a. Umayyah .....  | 47           |
| b. Abbasiyah .....  | 49           |
| c. Fatimiyah .....  | 51           |

|   |            |
|---|------------|
| 3. Masa Transisi.....   | 52         |
| a. Dinasti Mamluk.....  | 52         |
| b. Dinasti Mongol Islam.....  | 54         |
| 4. Masa Tiga Kerajaan Besar.....  | 55         |
| 5. Masa Modern .....  | 57         |
| <b>BAB III : GOLPUT DAN PEMILIHAN BUPATI TUBAN .....</b>                                      | <b>60</b>  |
| A. Golput (Golongan Putih) .....  | 60         |
| 1. Sejarah Golput .....   | 60         |
| 2. Makna Golput .....   | 62         |
| B. Gambaran Umum Kota Tuban .....   | 64         |
| 1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Kota Tuban .....   | 64         |
| 2. Sejarah kota Tuban .....   | 67         |
| 3. Kondisi Sosial Masyarakat Tuban .....  | 75         |
| a. Kondisi Perekonomian .....   | 75         |
| b. Pendidikan .....   | 76         |
| c. Agama .....  | 77         |
| 4. Dinamika Sosial-Politik di Tuban .....   | 79         |
| C. Pemilihan Bupati Tahun 2006 .....  | 91         |
| 1. Peran KPU dan PANWAS Kota Tuban dalam Penyelenggaraan<br>Pilbub Tuban .....                | 91         |
| 2. Pelaksanaan Pemilihan Bupati Tuban .....   | 96         |
| 3. Pencalonan .....   | 101        |
| 4. Pemungutan dan Perhitungan Suara .....   | 104        |
| 5. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilbub .....  | 112        |
| <b>BAB IV: MEMOTRET FENOMENA GOLPUT DALAM PEMILIHAN<br/>BUPATI KABUPATEN TUBAN 2006 .....</b> | <b>116</b> |
| A. Faktor Terjadinya Golput .....   | 116        |
| B. Politik Islam: Membaca Fenomena Golput .....   | 121        |
| C. Implikasi Golput dalam Penyelenggaraan Pemerintahan .....                                  | 126        |
| <b>BAB V : PENUTUP .....</b>  | <b>130</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 130        |
| B. Saran .....  | 132        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |            |
| <b>LAMPIRAN</b>   |            |
| <b><i>CURRICULUM VITAE</i></b>  |            |





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Memilih partai politik,<sup>1</sup> merupakan hak yang diberikan kepada setiap warga Negara Republik Indonesia untuk menyalurkan aspirasinya dalam pemilu yang diadakan lima tahun sekali. Dalam setiap perhelatan akbar, pemilu (pemilihan umum) di dunia manapun selalu dijumpai sekelompok masyarakat yang tidak menentukan pilihannya alias Golput (Golongan Putih).<sup>2</sup> Menengok sejarahnya, golput pada awalnya adalah “gerakan moral” yang dicetuskan pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta, tepatnya satu bulan sebelum dilaksanakannya pemilihan pertama pada masa Orde Baru.<sup>3</sup>

Semenjak dilaksanakannya pemilu pertama tahun 1955 angka golput cenderung terus naik. Bila dihitung dari pemilih tidak datang dan suara tidak sah, golput pada pemilu 1955 sebesar 12,34%. Pada pemilu 1971, ketika golput dicetuskan dan dikampanyekan, justru mengalami penurunan hanya 6,67%. Pemilu 1977 golput sebesar 8,40%, 9,61% (1982), 8,39% (1987), 9,05% (1992), 10,07% (1997), 10,40% (1999), 23,34% (Pemilu Legislatif 2004), 23,47% (Pilpres 2004 putaran I), 24,95% (Pilpres 2004 putaran II).

---

<sup>1</sup> Partai politik, merupakan salah satu wujud nyata untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat, dengan parta-partai inilah segala inspirasi yang beraneka ragam dapat disalurkan, Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 1996), hlm. 204-205.

<sup>2</sup> Istilah “Golput” merupakan penyebutan yang ditujukan bagi oarang-orang yang memilih (sengaja) atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam memilih. Lihat, Abdurrahman Wahid dkk, dalam *Mengapa Kami Memilih Golput* (Jakarta: Sagon, cet. 1, 2009), hlm. 98.

<sup>3</sup> Hendri F Isnaeni, Dalam Tajuk Harian dengan Tema “Menanti Angka Golput” diakses tanggal.

Pada Pilpres putaran II setara dengan 37.985.424 pemilih. Ada pun pada Pemilu Legislatif 2009 jumlah golput 30% bila dikalikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan Perpu No. I/2009 sebesar 171.265.442 jiwa. Jadi, jumlah golput setara dengan 51.379.633 pemilih (Kontan, 7/7).<sup>4</sup>

Golongan putih atau disingkat golput, bukanlah nama salah satu partai politik yang ikut dalam pelaksanaan pemilu, namun keberadaan golput senantiasa menyertai pelaksanaan pemilu baik pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, maupun pemilihan presiden. Fenomena ini semakin menguat semenjak dekade 70-an, di mana partai Golongan Karya (Golkar) sebagai salah satu partai peserta pemilu yang bukan dari unsur parpol, menjadi *single majority*<sup>5</sup> Kemunculan golput semakin marak ketika terjadi konsensus nasional yang menyepakati fusi beberapa parpol ke dalam PPP dan PDI, hal ini dapat dilihat ketika pelaksanaan pemilu 1992. Pada pemilu ke-5 yang terjadi pada masa Orde Baru. Banyak kalangan mahasiswa, terutama di Jogjakarta mengkampanyekan golput sebagai pilihan dalam pemilu.

Dalam perspektif politik Islam, sejarah mencatat, ketika nabi wafat pada 11 H/632 M. Sempat terjadi guncangan di antara umat Islam, hal tersebut disebabkan Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat atau menunjuk pengganti setelah ia wafat. Kenyataan tersebut ternyata menimbulkan polemik diantara umat Islam yang masing-masing memiliki anggapan bahwa pengganti Nabi harus berasal dari golongan mereka. Golongan Muhajirin dan Ansor, merupakan golongan yang memiliki kekuatan besar yang pada saat itu

---

<sup>4</sup> [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) akses tanggal 15 Desember 2009

<sup>5</sup> Said Agil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial* (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 179.

masing-masing menginginkan posisi pengganti Nabi. Perdebatan yang terjadi di Saqifah Bani Sa'ida, yang pada akhirnya membai'at Abu Bakar sebagai *Khalifaturrasul* pertama.

Bagaimanapun, terpilihnya Abu Bakar memiliki arti yang monumental bagi sistem kenegaraan bangsa-bangsa di dunia pada saat itu. Di mana nilai-nilai yang di terapkan mencerminkan suatu sistem yang demokratis,<sup>6</sup> seklaigus menepiskan upaya penerapan pemerintahan ala monarki. Pembai'atan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam saat itu terhadap Abu Bakar secara tidak langsung memberikan indikasi tentang legalitas kedaulatan rakyat,<sup>7</sup> meskipun belum dikenal pemilu secara langsung, namun consensus para Muhajirin dan Ansor ini dalam beberapa hal memiliki hakekat yang tidak jauh berbeda dengan pemilu yang ada pada saat ini.

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang atau kelompok, dan bagaimana seseorang atau golongan tersebut dapat menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala politik. Partisipasi dalam pemungutan suara merupakan bentuk kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam proses demokrasi. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali, mengalami pasang surut. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya golongan putih dalam

---

<sup>6</sup> M. As. Hikam, Mulyana W Kusuma et. al *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia* (Yogyakarta: Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 98

<sup>7</sup> Richard M. Ketchum (ed), *Demokrasi Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Niagara, 2004), hlm.

setiap pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih presiden, legeslatif dan pemilihan kepala daerah.<sup>8</sup>

Sebagai kasus, yang sifatnya kasuistik untuk membaca fenomena golput, menurut asumsi penulis setidaknya pemilu 2009 yang dilaksanakan pada April 2009 dapat dijadikan sebuah barometer untuk mengukur tingkat angka golput. Khusus untuk angka golput, banyak kalangan memprediksikan tidak akan jauh berbeda dengan Pemilu 2004 yang mencapai 34 juta suara. Hal itu ditandai dengan dominannya jumlah angka yang tidak memilih alias golput di beberapa pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurut catatan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dari 26 Pemilu kepala daerah tingkat provinsi yang berlangsung sejak 2005 hingga 2008, 13 pemilu gubernur 'dimenangi' golongan putih alias golput. Artinya, jumlah dukungan suara bagi gubernur pemenang Pilkada kalah ketimbang jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Pilkada DKI Jakarta misalnya. Jumlah masyarakat yang tidak memilih mencapai angka 39,2%. Nilai ini setara dengan 2,25 juta orang pemilih, sementara sebagai pemenang, Fauzi Bowo hanya dipilih oleh 2 juta orang pemilih (35,1%). Dari DKI Jakarta, Pilkada berlanjut ke Jawa Barat. Meski pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf berhasil mengantongi suara terbanyak dibandingkan kontestan lain, yaitu dengan perolehan 7.287.647 suara, jumlah golput jauh lebih besar; mencapai 9.130.594 suara. Begitu juga pada Pilkada Jawa Tengah yang dimenangi pasangan Bibit Waluyo-

---

<sup>8</sup> Syamsuddin Haris, "Golput dan Pemilu 2009", *Kompas*: 30 Juni 2008.

Rustriningsih dengan 6.084.261 suara. Jumlah golput di Jawa Tengah justru menembus angka 11.854.192 suara.

Pemilih Golput menjadi "pemenang" dalam Pilkada gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 yang digelar 23 Juli 2008. Angka golput jauh melebihi perolehan suara lima kandidat yang bertarung dalam pilkada. Berdasarkan pantauan *Kompas* di Kota dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan datang ke tempat pemungutan suara rata-rata hanya 60 persen dan paling tinggi sekitar 70 persen. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai angka 30-40 persen. Itu belum termasuk surat suara yang tidak sah karena unsur kesengajaan dari pemilih. Jika jumlah suara tidak sah dimasukkan dalam kategori golput, maka angkanya lebih besar.<sup>9</sup>

Bandungkan dengan hasil penghitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga, termasuk Litbang *Kompas*. Hasilnya menunjukkan, angka terakhir perolehan suara menempatkan pasangan Soekarwo - Saifullah Yusuf di urutan pertama dengan peroleh suara 25,5 persen. Sementara, pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di tempat kedua dengan perolehan suara sebesar 25,3 persen. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan langsung gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 yang digelar 23 Juli 2008, lebih rendah dibandingkan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2004 lalu. Sebaliknya, angka golput meningkat secara signifikan

---

<sup>9</sup> Runik Sri Astuti, *Kompas*. Golput Menang di Pilkada Jatim. Rabu, 23 Juli 2008

Tidak beda jauh dengan Pilgub, Pilkada kabupaten/kota mengalami hal yang sama. Catatan JPPR menunjukkan, dari 130 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilu, golput menempati posisi nomor wahid di 39 kabupaten/kota. Koordinator Nasional JPPR, Jeirry Sumampow menilai, rendahnya partisipasi masyarakat membuat legitimasi gubernur-wakil gubernur terpilih sangat rendah di mata rakyatnya sendiri. Dia memprediksi, besarnya jumlah golput dalam Pilkada akan merembet ke Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden pada 2009.<sup>10</sup>

Tuban sebagai salah satu kabupaten di Jawa timur yang memiliki sejarah panjang dalam hal pemerintahan, dari masa kerajaan di Jawa sampai masa kemerdekaan. Sistem pemilihan bupati di Kota Tuban berkembang dari masa ke masa, semasa kerajaan sistem pemilihan bupati tidak melibatkan partisipasi rakyat secara langsung tetapi melalui sistem turun temurun, sampai masa kemerdekaan, di mana sistem pemilihan bupati ditentukan oleh anggota dewan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

April 2006, untuk pertama kalinya Kota Tuban mengadakan pemilihan bupati dan wakil secara langsung dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Penelitian ini dilakukan di Kota Tuban, untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan langsung yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Kota Tuban. hal ini berkaitan dengan fenomena golput.

---

<sup>10</sup> <http://google.co.id>. "Membangun Kesadaran Menyisir Menghadapi Pemilu 2009", (Minggu, 15 Maret 2009).

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas timbul beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya fenomena golput dalam pemilihan Bupati Tuban?
2. Bagaimana pandangan politik Islam terhadap fenomena golput?
3. Adakah dampak golput dalam pemilu terhadap penyelenggaraan pemerintahan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan guna melihat permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya:

1. Mengidentifikasi faktor terjadinya golput dalam pemilihan Bupati Tuban.
2. Mengetahui bagaimana pandangan politik Islam dalam melihat fenomena golput dalam pemilihan Bupati Tuban.
3. Mengidentifikasi dampak golput terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

#### D. Tinjauan Pustaka

Kajian golput dalam perspektif politik Islam jarang sekali diketemukan, sepanjang proses pengumpulan bahan pustaka, penulis belum menjumpai literatur yang secara signifikan membahas golput dalam kajian politik Islam. Adapun buku-buku, skripsi, jurnal maupun opini yang ada masih bersikap umum, di antaranya adalah:

Buku Mengapa Kami Memilih Golput karya Abdurrahman Wahid dkk, mengemukakan bahwa golongan Golput lebih merupakan bentuk transformasi politik masyarakat yang kecewa terhadap sistem dan iklim politik pemerintah yang selama ini tidak sehat.<sup>11</sup>

Selanjutnya buku 8 Pertanyaan dan Jawaban Seputar Fatwa Haram Golput karya Miswan Thahad, menjelaskan salah satunya tentang golput yang dimuat dalam bentuk tanya jawab, sehingga memudahkan para pembaca dalam mempelajari dan memahami bagaimana sebetulnya golput dalam pandangan Syari'ah Islam, apakah memilih pemimpin (melalui pemilu) merupakan hak dan kewajiban.<sup>12</sup>

Golput dalam Perspektif Islam, inilah salah satu sub judul yang ada dalam buku Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA. Yang berjudul Tasawuf Sebagai Kritik Sosial. Dalam tulisan ini keberadaan golput dilihat dari sisi sejarah Islam, yaitu ketika Nabi Muhammad saw wafat maka umat Islam sempat digoncangkan mengenai siapakah yang menjadi pengganti Rasulullah. Lebih lanjut, dengan hadirnya *khulafa* sebagai pengganti kepemimpinan

---

<sup>11</sup> Wahid, dkk, *Mengapa.....*

<sup>12</sup> Miswan Thahad, *8 Pertanyaan dan Jawaban Seputar Fatwa Haram Golput* (Jakarta: Al-I'stisham, 2009).



Rasulullah dalam urusan pemerintahan kalau dikritisi banyak indikasi-indikasi yang mencerminkan nilai-nilai demokratis, maka dengan fenomena semacam ini kita dapat melihat relevansi pemilu atau golput dalam wacana tarikh Islam era klasik.<sup>13</sup>

Arif Budiman dalam bukunya yang berjudul *Kebebasan, Negara, Pembangunan* yang merupakan kumpulan tulisan 1965-2005, ia menyatakan pendapatnya bahwa golput pada saat ini hukumnya "tidak wajib" hal ini dikarenakan pemilu 2004 paratai bebas berdiri dan tidak dihalangi oleh pemerintah, tidak seperti pada 1972 di mana partai-partai yang tidak disukai pemerintah saat itu dilarang berdiri (kembali).<sup>14</sup>

Miriam Budiardjo, dalam bukunya yang berjudul *Dasa-dasar Ilmu Politik*, membahas masalah golput dalam salah satu sub babnya, ia menjabarkan ada beberapa kategori pemilih resmi yang ditentukan oleh pemerintah, yakni: kategori suara tidak sah dan kategori yang tidak menggunakan hak pilih, namun oleh media massa hal ini dijadikan satu, dan golput dinyatakan termasuk didalamnya.<sup>15</sup>

Sigit Pamungkas, dalam bukunya yang berjudul *Pemilu, Prilaku Pemilih, dan Kepartaian*. Ia menjelaskan dalam salah satu sub babnya tentang beberapa tafsir tentang golput.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Siradj, *Tasawuf*.....

<sup>14</sup> Arif Budiman, *Kebebasan, Negara, Pembangunan, Kumpulan Tulisan 1965-2005* (Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006).

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

<sup>16</sup> Sigit Pamungkas, *Pemilu, Prilaku Pemilih dan Kepartaian* (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2010)

Syamsul Hadi Thubany, dalam bukunya yang berjudul *Partisipasi Semu*, ia menjelaskan bahwa partisipasi warga merupakan proses melibatkan warga masyarakat dalam pembuatan keputusan bersama dalam hal pemanfaatan sumberdaya untuk pembangunan daerahnya<sup>17</sup>

Selain beberapa buku tersebut, terdapat beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi, yang juga membahas tentang golput dari kaca mata dan kajian yang berbeda, antara lain:

Dalam skripsi Stephanus Mulyadi dengan judul “Persoalan Hak-Hak Warga Negara Dalam Pemilu di Indonesia Sebuah Telaah Filosofis Studi Kasus Pemilu 1992”.<sup>18</sup> Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauzan yang berjudul “Fatwa Hukum Pengharaman Golput Pada Ijma’ Ulama 2009 di Padang”.<sup>19</sup> Begitu pula skripsi yang ditulis oleh Riki Marjono, yang berjudul “ Hukum Golput dalam Pemilu di Indonesia (studi komperatif antara MUI dan MMI)”.<sup>20</sup> Skripsi yang ditulis oleh Ainur Rojikin, yang berjudul “Golput Menurut Islam (studi pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003; Tentang Pemilu)”, dalam skripsi mengulas tentang bagaimana hukum pemidanaan pengajak golput pada pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003, dan bagaimana pandangan Islam terhadap materi dan sangsi pengajak golput pada pasal 139 UU no. 12 Tahun 2003.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Syamsul Hadi Thubany, *Partisipasi Semu* (Tuban: Bina Swagiri, 2004)

<sup>18</sup> Stephanus Mulyadi, “*Persoalan Hak-Hak Warga Negara Dalam Pemilu Di Indonesia Studi Kasus Pemilu 1992*,” tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (199)

<sup>19</sup> Ahmad Fauzan, “*Fatwa Hukum Pengharaman Golput pada Ijma’ Ulama 2009 di Padang Panjang*” tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (2009).

<sup>20</sup> Riki Marjono, *Hukum Golput dalam Pemilu Di Indonesia (studi komperatif antara MUI dan MMI)*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (2009).

<sup>21</sup> Ainur Rojikin, “*Golput Menurut Islam (studi pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003)*”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2009).

Munculnya gelombang kebangkitan Islam ini bersamaan dengan gelombang demokratisasi yang memiliki implikasi serius mengenai perdebatan tentang fenomena golput dalam politik nasional khususnya, faktanya pembicaraan mengenai golput menjadi diskusi yang menarik karena keberadaannya yang selalu eksis dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia, oleh karena itu penulis mencoba melihat fenomena ini dari sudut pandang politik Islam. Dan yang membedakan tulisan ini dengan tulisan yang sudah adalah, tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana partisipasi politik dalam pemilu sehingga muncul golput dari kacamata politik Islam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Mendirikan sebuah negara atau pemerintahan untuk mengelola urusan rakyat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak akan mungkin tegak tanpa negara atau pemerintahan.<sup>22</sup> Ukuran tegaknya suatu nilai-nilai agama seperti keamanan, keadilan, keteraturan, dan keadaban hanya mungkin dicapai melalui negara dan pemerintahan.

Lembaga kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.<sup>23</sup> Pengangkatan kepala Negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut ijma'. Para

---

<sup>22</sup> Syaifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 13.

<sup>23</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (terj) Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 15.

mujtahid aliran-aliran Islam secara keseluruhan kecuali kelompok Syi'ah<sup>24</sup> bersepakat bahwa jalan mencapai kursi keimamahan harus melalui pemilihan dan kemufakatan, yang dapat diartikan bahwa jabatan tersebut didapatkan bukan dari wasiat atau penunjukan. Untuk memahami hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok bahasan yang ada di dalam penelitian ini

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi dan dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi jenis ini bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sportif, atau tidak efektif. Kegiatan warga negara dalam partisipasi politik dapat berupa pemberian suara, ikut dalam kampanye atau menjadi anggota partai politik dan lain-lain. Secara umum, partisipasi politik difahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh kelompok dalam kehidupan sosial dan politik.<sup>25</sup> Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah (sistem politik).<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Dalam hal ini tidak ada keharusan untuk membedakan mazhab Syi'ah atau yang lainnya, karena sikap mereka dapat dikatakan telah selesai ketika imam mereka lenyap (gaib). Kemudian masalah ini kembali pada pengakuan salah seorang mujtahid dari umat untuk menjadi pengganti atau wakil imam atau gaib tersebut, hal ini berlangsung sejak abad ke3 sampai sekarang, mereka yang disebut sebagai Syi'ah imamiyyah. Syi'ah Zaidiyyah mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, artinya, mereka mengakui kedua kasus ini dengan bai'at dan pemilihan . mereka berpendapat bahwa imamah adalah berdasarkan syura (musyawarah) di antara semua keturunan Fatimah. Dengan bgt dapat dikatakan kelompok ini mengakui konsep syura, meskipun membatasinya dalam lingkup tertentu. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (terj) Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 166.

<sup>25</sup> AbdulYani, *Sosiologi Kelompok dan Masalh Sopsial*, (Jakarta: Fajar Agung, cet. Ke-1, 1987), hlm. 170.

<sup>26</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* ( Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 144

Selanjutnya jika dipahami substansi dari aspek politik-demokrasi yang ada di atas maka lahirlah adanya sebuah proses dihormatinya hak setiap individu dalam sebuah bangsa/negara untuk memilih pemimpin sesuai dengan aspirasinya, artinya tidak boleh adanya sebuah paksaan kepada mereka untuk memilih seorang pemimpin tertentu yang tidak dikehendaki, ketentuan ini sesuai dengan ajaran yang digariskan oleh Agama Islam melalui perangkat *syura* (permusyawaratan) dan *ba'iat* (komitmen ketundukan yang disertai kontrak politik yang mengikat rakyat untuk tunduk kepada pemimpin yang dipilihnya), tegas Yusuf al-Qaradhawi.<sup>27</sup>

Dalam teori pilihan rasional dikemukakan bahwa manusia politik (*homo politicus*) sudah menuju kearah manusia ekonomi (*homo economicus*), hal ini berkaitan erat dengan adanya faktor politik dan ekonomi, terutama dalam penentuan kebijakan publik.<sup>28</sup> Artinya kebijakan politik haruslah dilaksanakan dengan baik<sup>29</sup> dan memiliki garis lurus dengan ekonomi atau kesejahteraan rakyatnya.

## F. Metode Penelitian

Partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada menjadi penentu untuk pengambilan keputusan dalam menentukan wakil rakyat, namun partisipasi politik masyarakat dalam setiap pemilihan terkadang menurun

---

<sup>27</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik; Bantahan Tuntas Terhadap Sekulerisme dan Liberalisme*, (terj) Khoirul Amru Harahap, Lc. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 188.

<sup>28</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 92.

<sup>29</sup> SP. Varma, *Teori Politik Modern* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2007), hlm. 260.

sehingga menciptakan kelompok sendiri yang sering disebut golput (golongan putih), kelompok ini tidak menggunakan haknya dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali oleh negara

Fenomena inilah yang membuat penulis ingin melakukan penelitian yang bersifat kualitatif, hal ini dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa buku, dan artikel baik dari media masa maupun jurnal yang memberikan informasi tentang bagaimana partisipasi politik, dan perilaku masyarakat yang terkait dengan golput :

#### 1. Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka pengumpulan data langsung di lapangan atau lokasi penelitian<sup>30</sup> di mana partisipasi politiknya rendah sehingga berpotensi golput

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat yang kemudian menimbulkan golput dalam setiap pemilu.

#### 3. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka data-data yang sudah dianalisis dengan pendekatan kualitatif, tujuannya supaya dapat ditemukan sebuah informasi atau hasil karya ilmiah yang dapat memberikan sumbangsih terhadap khazanah keilmuan yang ada

---

<sup>30</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penulisan dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA Press, 1998), hlm 20-21.

#### 4. Metode Pendekatan / Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah, Pendekatan Prilaku

Pendekatan ini mempelajari perilaku manusia yang dipandang memiliki gejala yang benar-benar bisa diamati.<sup>31</sup> Pembahasan prilaku ini tidak hanya terbatas pada perseorangan tetapi juga dapat mencakup kesatuan-kesatuan kelompok yang lebih besar, seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok elit, gerakan nasional, atau suatu masyarakat politik.

Salah satu ciri khas pendekatan ini adalah pandangan bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial, dan negara sebagai sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial. Pendekatan ini tidak menganggap lembaga-lembaga formal sebagai titik sentral atau sebagai aktor yang independen, tetapi hanya sebagai kerangka untuk kegiatan manusia.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam kajian ini dibagi dalam beberapa bab serta sub bab untuk memudahkan memahai kajian ini secara runtut. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut: Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang yang merupakan kegelisan akademik, rumusan masalah yang berupa pertanyaan singkat dari latar belakang yang sudah

---

<sup>31</sup> Budiarto, *Dasar-dasar...*, hlm. 74.

dipaparkan, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka yang berisi karya-karya ilmiah yang sudah ditulis atau dikaji sebelumnya, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan Bab II, huruf A berisi partisipasi politik dan pemilihan kepala negara dalam politik Islam, bagaimana partisipasi politik, tipologi, macam dan bentuk partisipasi serta perilaku pemilih. Huruf B berisi penyelenggaraan pemerintahan yang berisi, bagaimana pengangkatan kepala negara yang meliputi syarat, tugas dan kewajiban kepala negara. Huruf C berisi, proses suksesi kepala negara dalam politik Islam dari masa klasik, pertengahan sampai modern. Bab III, huruf berisi golput dan pemilihan bupati Tuban 2006, huruf A berisi tentang sejarah dan makna golput. Huruf B berisi gambaran umum Kota Tuban yang meliputi sejarah, seluk-beluk, sejarah, dan kondisi sosio masyarakat Tuban. Selanjutnya berisi tentang pemilihan Bupati Tuban 2006 dan bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan tersebut. Bab IV berisi, faktor-faktor terjadinya golput, golput dalam politik Islam dan implikasi golput dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bab V penutup, bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan saran untuk penelitian selanjutnya



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Demokrasi, sistem pemerintahan dari rakyat oleh dan untuk rakyat, dan Pemberian suara dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Dalam praktek demokrasi pemilihan umum merupakan elemen penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik, istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik.

Hak warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari pengakuan dan kepercayaan Allah kepada manusia, tanpa melihat asal-usul, ras, etnik dan strata sosial politiknya. Sebagai khalifah, manusia d anugrahi kemulyaan, akal budi dan kapasitas untuk berbuat. Ada tiga karamah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yakni, pertama: *karamah fardiyyah* (kemulyaan individu), yang berarti bahwa islam melindungi hak-hak dasar kehidupan manusia sebagai individu, baik hak spritual maupun matrial. Kedua, *karamah ijtima'iyyah* (kemulyaan kolektif), yang berarti bahwa islam menjamin hak-hak individu dalam masyarakat, menjamin hak untuk mendapat perlakuan yang sama dan berkeadilan dalam sebuah komunitas. Ketiga, *karamah siyasah* (kemulyaan politik), yang berarti

bahwa islam memberi hak kepada setiap individu untuk memilih dan dipilih dalam kepemimpinan politik.

Munculnya golput dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan memilih adalah hak setiap warga masyarakat untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan negara baik untuk memilih presiden, legislatif maupun bupati. Golput pertama kali dideklarasikan Kamis, 3 Juni 1971 di gedung Balai Budaya Jakarta sebagai gerakan moral sebagai cara protes terhadap penguasa Orde Baru yang cenderung memusatkan kekuasaan sehingga menghambat pengembangan demokrasi. Catatan golput terbesar terjadi saat dilaksanakannya pemilu pada tahun 1955, sebanyak 12,34 persen pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dan dimasukkan dalam kelompok golput.

Namun, Jika kekecewaan pemilih terus berlarut dan bertambah di masa yang akan datang, tidak menutup kemungkinan akan terjadi apatisisme mayoritas sehingga kemenangan ada ditangan golput, hal ini akan mengakibatkan lemahnya legitimasi kepemimpinan terpilih. Pemimpin yang terpilih pada hakekatnya adalah pemimpin yang tidak dikehendaki, jika kebijakan-kebijakan tidak ditaati atau kurang mendapat respon positif dari masyarakat maka hal ini dapat membahayakan kelangsungan pemerintahan yang sukses dan mensejahterakan. Rakyat pemilih yang absten atau tidak memberikan hak suaranya menunjukkan bahwa mereka paham dengan hak mendapatkan pemenuhan janji pemilu. Hal ini juga dapat menjadi tolak ukur sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon pemimpinnya.

## **B. Saran**

Kajian mengenai golput dalam dunia politik setidaknya sampai saat ini masih belum begitu banyak untuk dibahas dan dikaji secara mendalam, apalagi dalam diskursus politik Islam. Oleh karenanya penulis dalam hal ini menyajikan diskursus golput dalam pemilu yang dilihat dari sudut pandang politik Islam.

Kedepan diharapkan kajian-kajian seperti ini, akan kian banyak untuk dapat ditulis sehingga akan memudahkan sekaligus memperkaya kahazanah keilmuan yang ada. Penulis menyarankan untuk meneliti pengaruh money politik terhadap eksistensi golput dalam pemilihan umum.

suaranya menunjukkan bahwa mereka paham dengan hak mendapatkan pemenuhan janji pemilu. Hal ini juga dapat menjadi tolak ukur sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon pemimpinnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal, *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ira', 2001
- Al-Mawarddi, Imam, Abdul Hayyie al-Kattani (trj), *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 200
- Alim, Muhammad, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS, 2010
- Amin, Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amza, 2010
- A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Asfar, Muhammad, *Presiden Golput*, Surabaya: Jawa Pos Press, 2004
- BPS Kabupaten Tuban, *Kabupaten Tuban Dalam Angka*, Tuban: BPS, 2003
- Budiman, Arif, *Kebebasan, Negara, Pembangunan*, Kumpulan Tulisan 1965-2005, Yogyakarta: Pustaka Alfabet dan Freedom Institut, 2006
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2003
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2001
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4,
- Fauzan, Ahmad, "Fatwa Hukum Pengharaman Golput Pada Ijma' Ulama 2009 di Padang Panjang", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009
- Fakih, Aunur Rohim, *Kepemimpinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Haris, Syamsudin, *Proses dan Fungsi Pemilihan Umum Catatan Pendahuluan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Yogyakarta: PPW-LILI, 1997
- Hr, Ridwan, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: UII Press, 2007

<http://www.jprr.or.id> Menggunakan Joomla

<http://www.tubankap.go.id/profil>

Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokrasi Ketiga* (tej) Asril Marjohan, Jakarta: Grafiti, 1997

Isnaeni, Hendri F, Dalam Tajuk Harian dengan Tema “Menanti Angka Golput”

Jurdi, Syaifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Kamil, Sukron, *Islam dan Demokrasi*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002

Kamali, Muhammad Hasyim, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1996

Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tuban, *Selayang Pandang Kota Tuban*, Tuban: Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tuban, 2003

Laporan Kerja KPUD Tuban Tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati Tuban 27 April 2006

Laporan Akir Panwas Kabupaten Tuban Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden tahun 2009

Maududi, Abu A’la, *Khalifah dan Krajaan* (trj) Muh al-Baqir, Bandung: Mizan, 1996

Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Maliki, Zainuddin, *Politik Busuk Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, Yogyakarta: Galang Press, 2004

Marjono, Riki, *Hukum Golput dalam Pemilu di Indonesia (studi Komperatif Antara MUI dan MMI)*, Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009

Mulyadi, *Persoalan Hak-hak Warga Negara dalam Pemilu Di Indonesia Studi Kasus Pemilu 1992*, Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999

Muzaffari, Kekuasaan Islam (trj) Abdul Rahman, Yogyakarta: Pustaka Panjimas, 1994

- Nasuka, *Partisipasi Rakyat dan Anggota TNI dalam Pemilu*, Bandung:Mandar Maju, 2007
- Nasution, Harun, *Pembaruan dalam Dunia Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta:Bulan Bintang, 1986
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985
- Nur, Deliar, *Pengantar Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali, 1983
- Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Pamungkas, Sigit, *Pemilu, Prilaku pemilih, dan Kepartaian*, Yogyakarta: Instit For Democracy and Walfarism, 2010
- Penjelasan UU. RI No. 37 Thn 2003, Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- Pemkab Tuban, *Pemerintahan Kabupaten Tuban dalam Untaian Sejarah*, Tuban: Pemkab Tuban 2006
- Perda Nomer: 2/Prt/DPRD-GR/1969 tanggal 16 Agustus 1969
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- \_\_\_\_\_, *Prinsip-prinsip Piagam Madinah Ditinjau dari pandangan al-Qur'an*, Jakarta:Rajawali Press, 1997
- Rojikin, Ainur, *Golput Menurut Islam (Studi Pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003)*, Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta:2009
- Russel, Bertrand, *Kekuasaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988
- Siraj, Said Agil, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, Bandung: Mizan, 2006
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: UII Press, 1993
- SP, Verma, *Teori Politik Modern*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992
- Syalabi, *Sejarah dan Kebudian Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2007

Sharizal, *Harian Pemikiran Rakyat*, Senin 1 Juni 2009

Suryono, Hasan, *Ilmu Negara*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), 2008

Sudarsono, *Mahkama Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, Jakarta: Sekretraris Jendral dan Kepanitraan Mahkama Konstitusi Republik Indonesia, 2005

Syafruddin, Ateng, *Kapita Selekta hakekat Otonomi Daerah dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Citra Media, 2006

Thahad, Miswan, *8 Pertanyaan dan Jawaban Seputar Fatwa Haram Golput*, Jakarta: al-I'stisham, 2009

Thubany, Syamsul Hadi dkk, *Partisipasi Semu*, Tuban: Bina Swagiri, 2004

Tricahyo, Ibnu, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: In-Trans Publishing, 2009

Wawancara dengan Ketua KPUD Kabupaten Tuban Bpk. Soeminto Karmani, 12 Desember 2010

Wahid, Abdurrahman dkk, *Mengapa Kami Memilih Golput*, Jakarta: Sagon, 2009

Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

[www. Kpu.go.id](http://www.Kpu.go.id)

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010